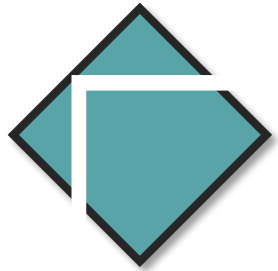




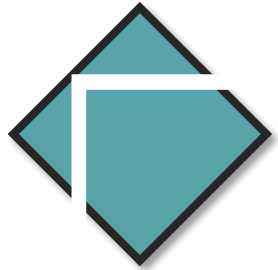
ARAH KEBIJAKAN DAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN
**SEKTOR PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Disampaikan pada Rakortek Dinas Perkim Tahun 2021
Banjarmasin, 24 Februari 2021

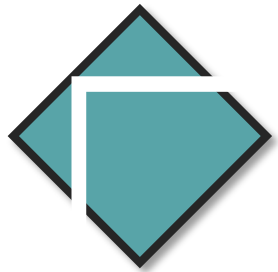
OUTLINE



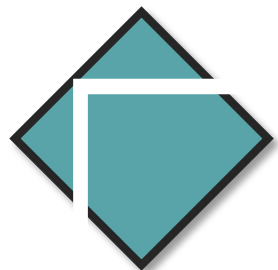
GAMBARAN UMUM



CAPAIAN PEMBANGUNAN



ISU STRATEGIS



ARAH KEBIJAKAN



1 GAMBARAN UMUM

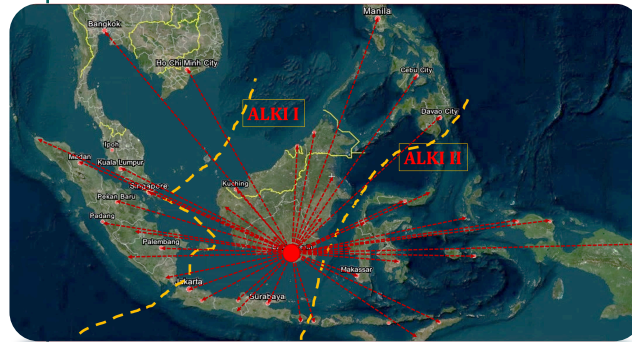


GAMBARAN UMUM KALIMANTAN SELATAN

Kalimantan Selatan berada di sentral / di tengah – tengah Indonesia.

- Luas Wilayah : **37.530,52 Km²** (6,96 % dari Pulau Kalimantan)
- Jumlah Penduduk : **4.244.096 Jiwa (2019)**
- Wilayahnya : 2 Kota dan 11 Kabupaten

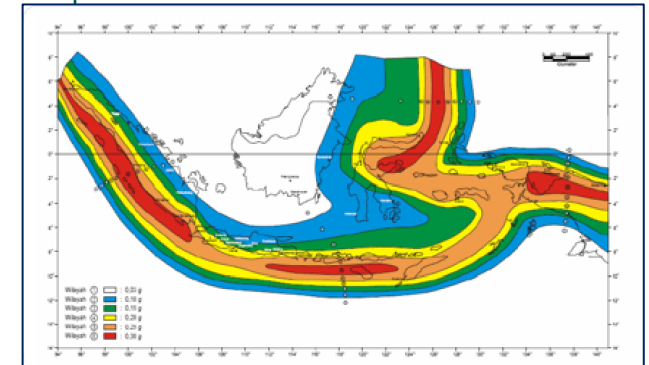
A. POSISI STRATEGIS DI TENGAH INDONESIA



Provinsi Kalimantan Selatan berada pada wilayah 1 menurut zone gempa di Indonesia, sehingga daerah ini relatif aman dari ancaman bencana gempa dan tsunami.

(Profil Daerah Rawan Bencana, 2007)

B. BEBAS DARI BAHAYA GEMPA



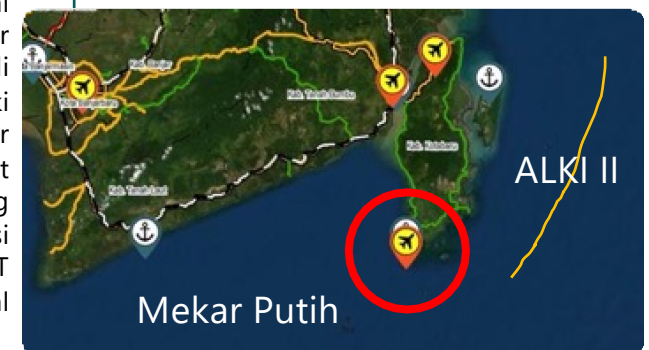
- Perairan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada ALKI-2 (Alur Laut Kepulauan Indonesia)
- Jalur pelayaran Internasional yang cukup strategis dan menjadi persinggahan kapal-kapal dari Australia Barat ke Filipina, Taiwan, dan China maupun sebaliknya.
- Jalur pelayaran Internasional ke wilayah Utara menuju ke negara tetangga. Negara tersebut seperti Malaysia, Brunei, Filipina, China, Korea, Hongkong, Jepang dll.

C. PERAIRAN LAUT



Kalimantan Selatan mempunyai Kawasan Mekar Putih yang berpotensi dikembangkan sebagai Pelabuhan Internasional dan Pusat Industri. Hal ini didukung oleh beberapa faktor seperti letaknya di ALKI II, berada di tengah – tengah Indonesia, memiliki kedalaman laut antara 18 - 22 meter yang dapat menjadi tempat bersandar kapal – kapal benua yang berukuran besar untuk mengisi logistik, dan sudah ada pelabuhan IBT yang beroperasi sehingga tinggal dikembangkan saja.

D. KAWASAN POTENSIAL KEK MEKAR PUTIH



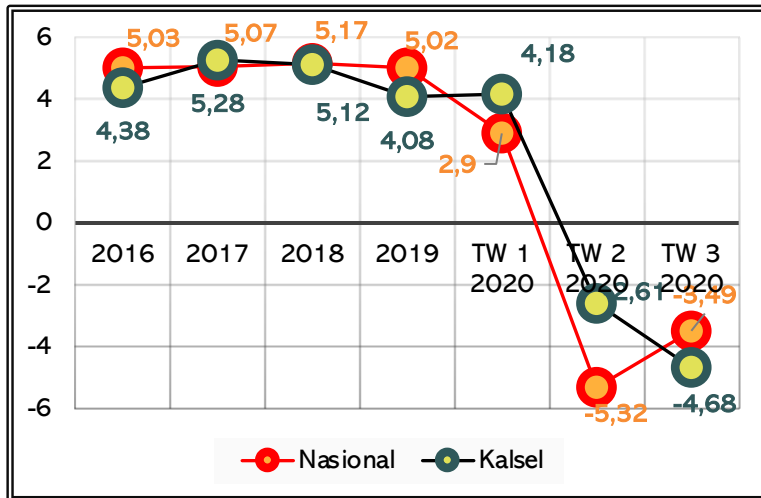


2 **CAPAIAN PEMBANGUNAN**



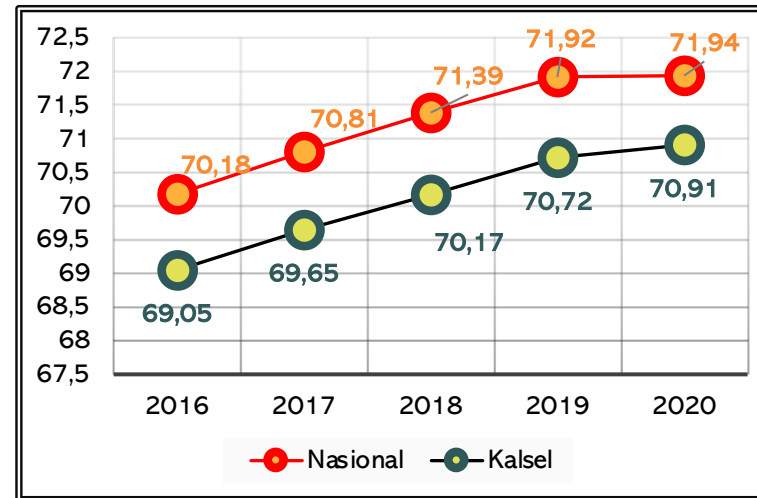
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pertumbuhan Ekonomi



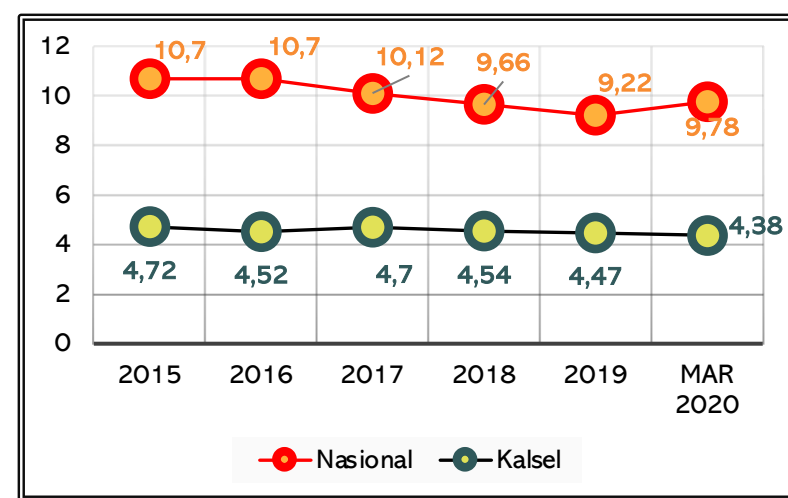
PROYEKSI 2021 : 1,3 – 1,5
TARGET 2022 : 4,0 – 4,5

Indeks Pembangunan Manusia



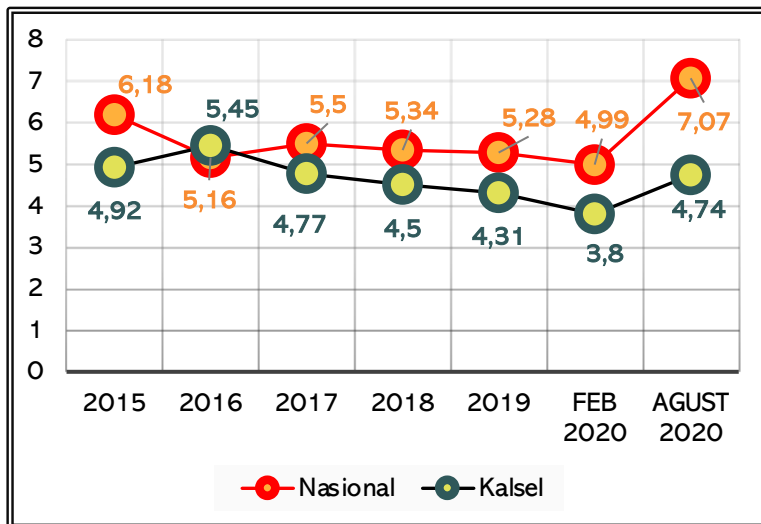
PROYEKSI 2021 : 71 – 71,4
TARGET 2022 : 71,2 – 72,6

Tingkat Kemiskinan



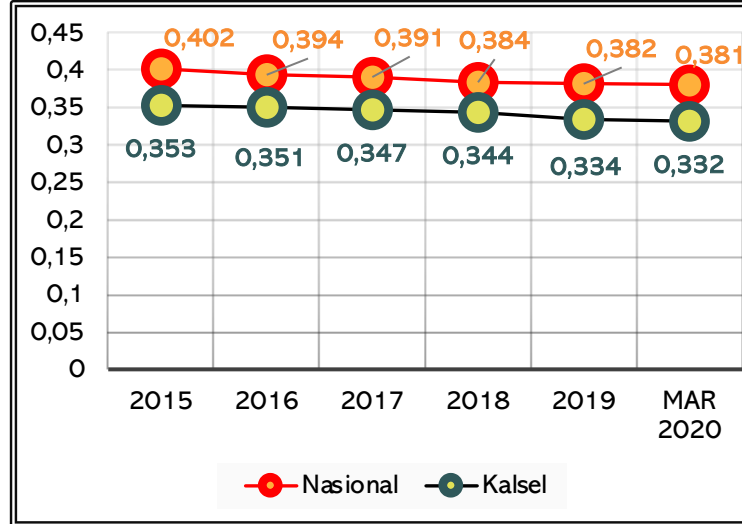
PROYEKSI 2021 : 4,4 – 5,5
TARGET 2022 : 4,1 – 4,5

Tingkat Pengangguran Terbuka



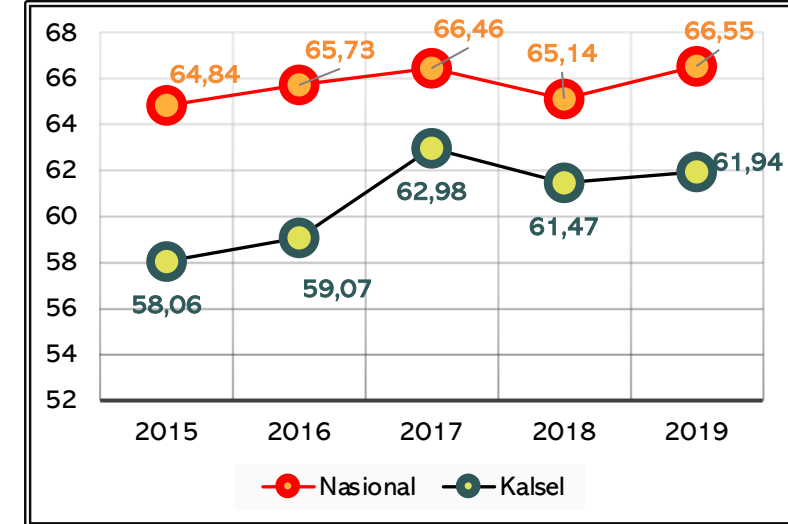
PROYEKSI 2021 : 4,5 – 5,0
TARGET 2022 : 4,0 – 4,5

Gini Ratio



PROYEKSI 2021 : 0,345
TARGET 2022 : 0,340

Indeks Kualitas LH



PROYEKSI 2021 : 62,25
TARGET 2022 : 62,63

Capaian Pembangunan Infrastruktur

BINA MARGA



% Jalan dalam Kondisi Mantap
2019 : 79,07%
2020 : 79.92%



% Jembatan dalam Kondisi Mantap
2019 : 80,55%
2020 : 83,38%

SUMBER DAYA AIR



% Infrastruktur Irigasi dalam Kondisi Baik
2019 : 43,27%
2020 : 49,17%



% Pengendali Daya Rusak Air Dalam Kondisi Baik
2019 : 90,78%
2020 : 98,73%

CIPTA KARYA



Cakupan Pelayanan Air Minum
2019 : 81,55%
2020 : 84,45%



Cakupan Pelayanan Air Limbah
2019 : 76,73%
2020 : 77,36%

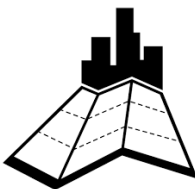


% Sarpras Publik dan Aparatur
2019 : 63%
2020 : 79.92%

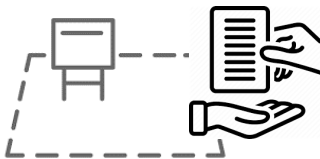
PENATAAN RUANG

2019 : 67%
2020 : 67,84%

Persentase pelaksanaan Kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang



PERTANAHAN



2019 : 27,18%
2020 : 24,1%

Persentase pelaksanaan kegiatan penguasaan/penyediaan tanah untuk proyek pembangunan

TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DINAS PERKIM

PERSENTASE LUASAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERUMAHAN DALAM KONDISI BAIK

2019 : 76,89%
2020 : 77,025%



% luasan kawasan permukiman kumuh



%Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan kualitasnya



%PSU perumahan di permukiman dalam kondisi baik



%Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Rumah Umum***

TARGET 2022*

25%

CAPAIAN

2019 : 23,56%

2020 : 23,17%

TARGET 2022*

30%

CAPAIAN

2019 : 21,38%

2020 : 29,46%

TARGET 2022*

20%**

CAPAIAN

2019 : 46,1%

2020 : 72%

TARGET 2022*

100%

*) Masih menyesuaikan dengan Permendagri 18/2020 dan masih didiskusikan seiring penyusunan renstra

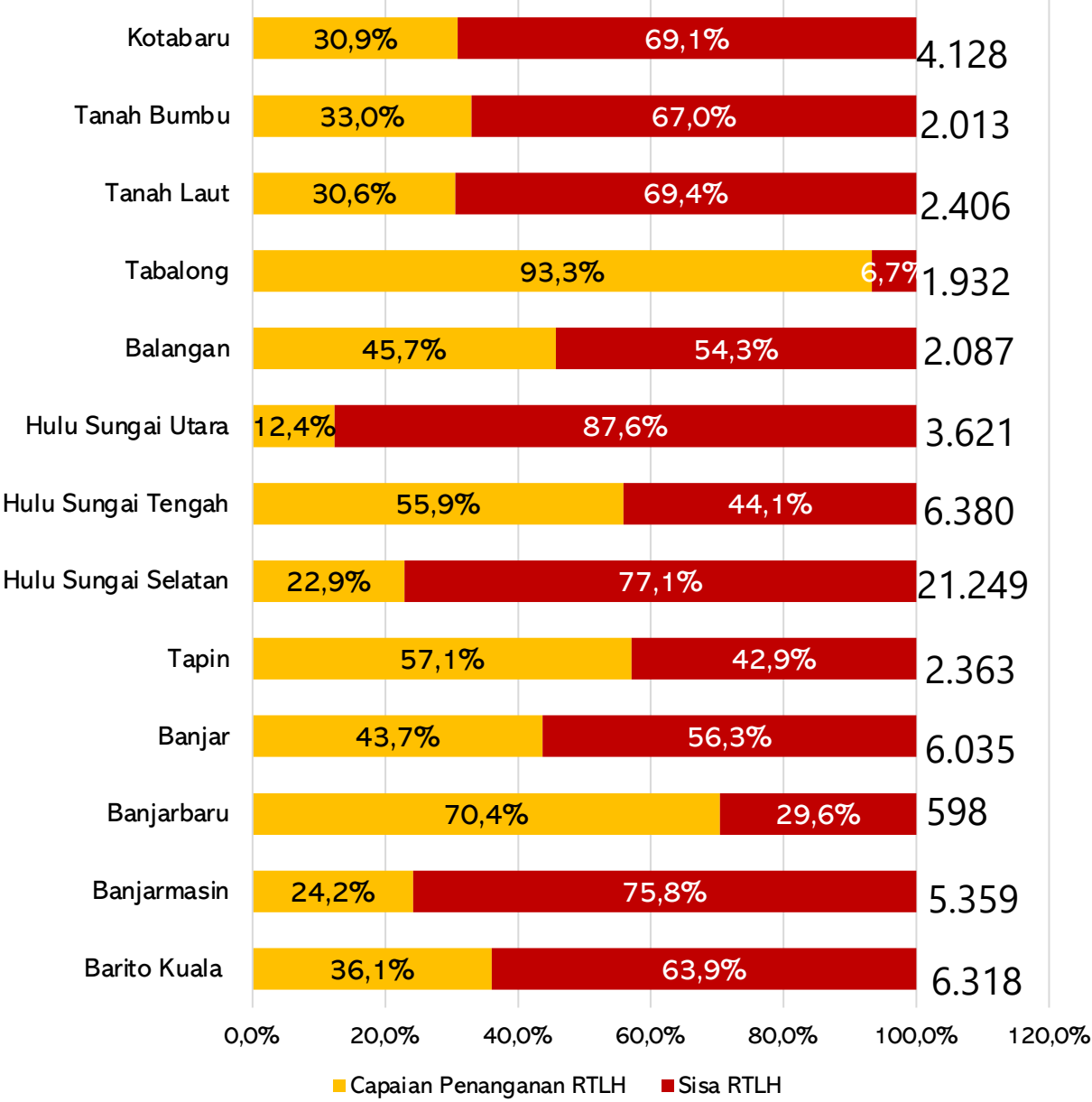
**) Penetapan target berdasarkan kurun waktu 5 tahunan berikutnya

***) Tahun 2019 dan 2020 tidak ada bencana dan program pemerintah yang mengharuskan pembangunan rumah dan relokasi rumah

CAPAIAN RTLH

*Kalsel masih berada
di bawah nasional
Urutan ke-25 dari 34 provinsi*

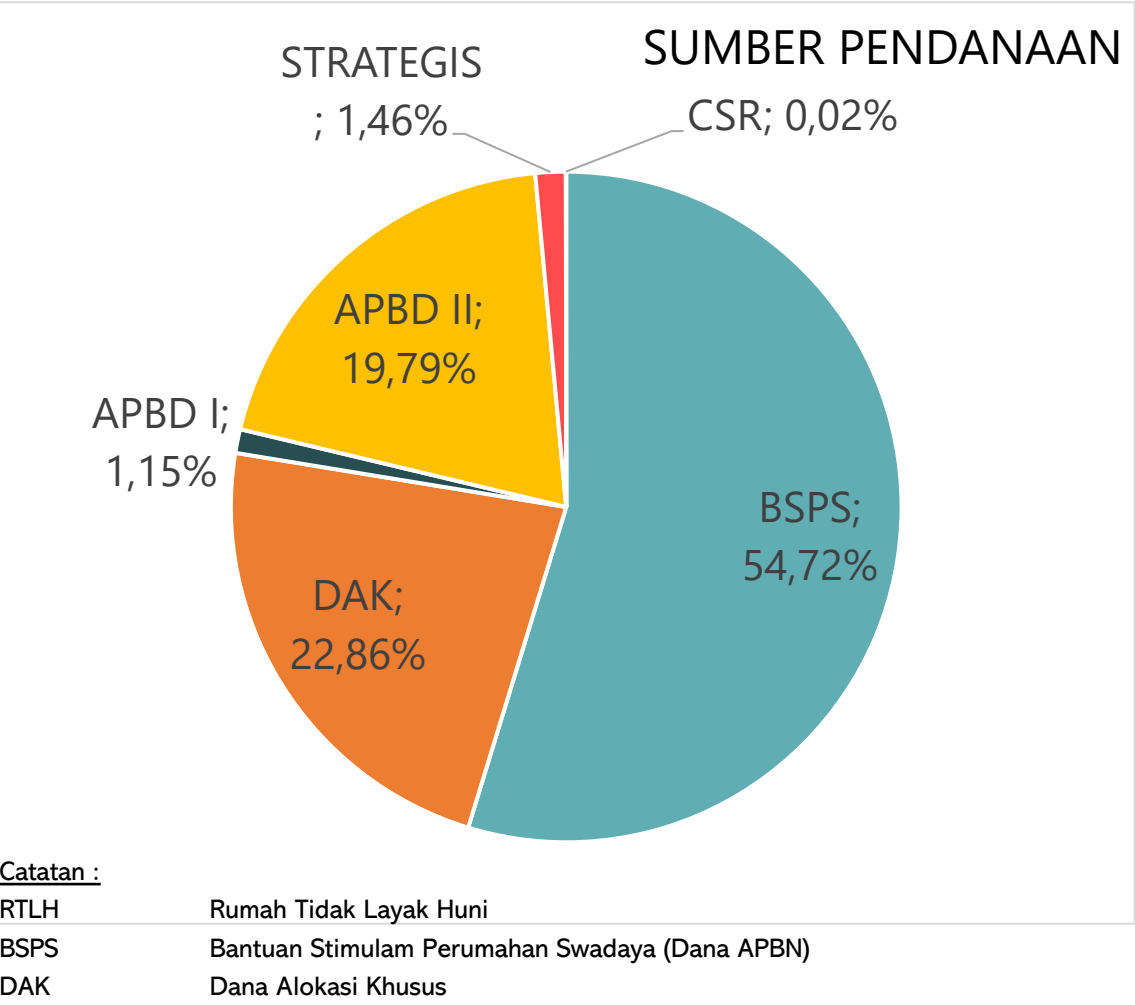
Capaian Penanganan RTLH Kalsel
Tahun 2016 - 2019



BASELINE TNP2K 64.579

Capaian 2016 s/d 2019 : 34,6% (22.321)

Sisa RTLH : 65,4% (42,258)



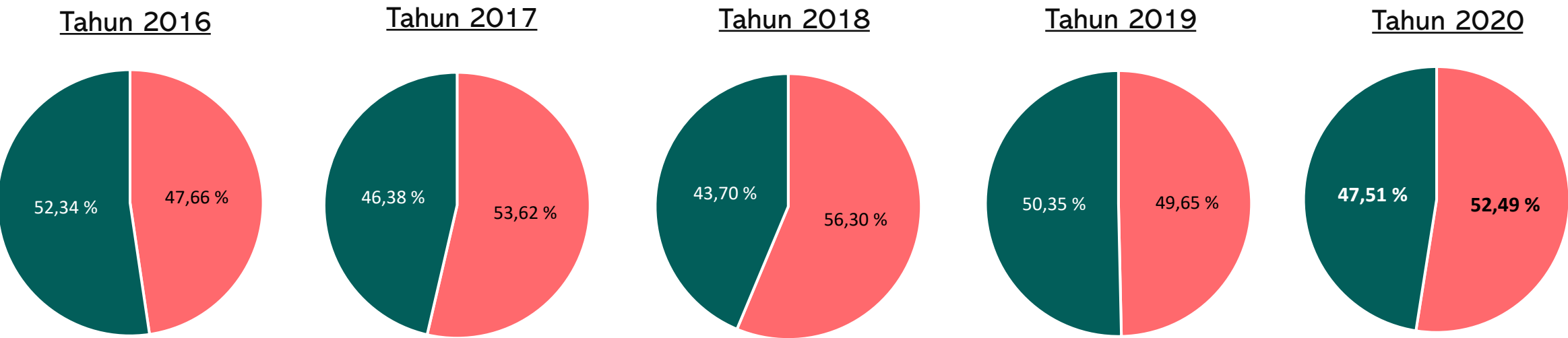
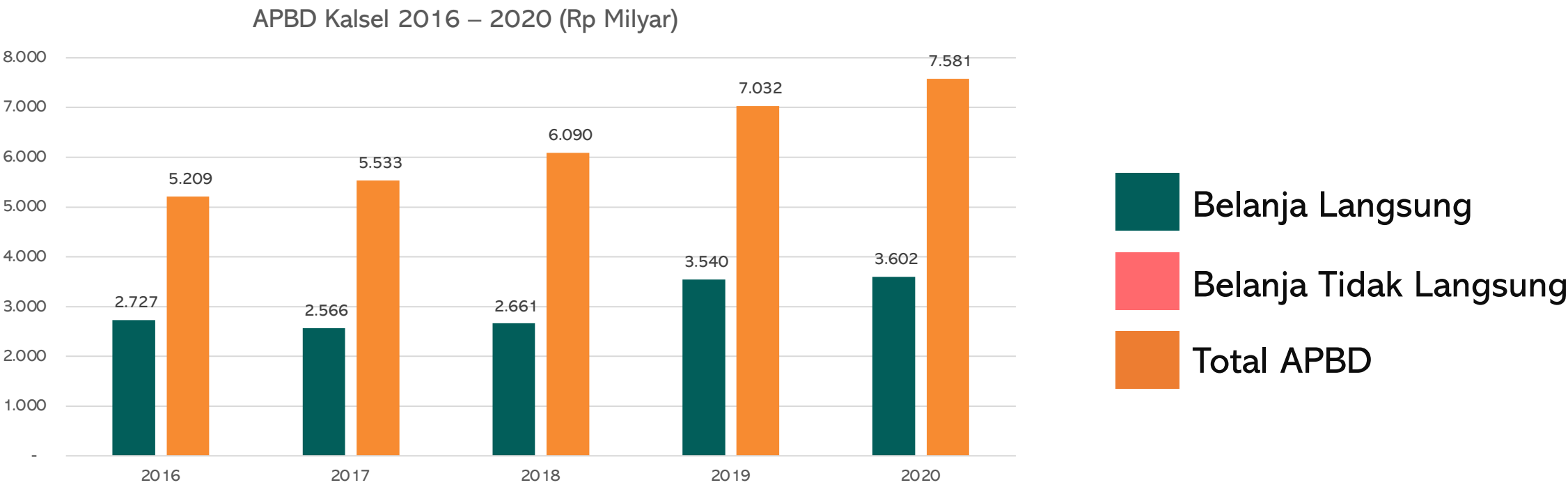
DATA KAWASAN KUMUH DI PERKOTAAN

Provinsi Kalimantan Selatan

NO.	KABUPATEN/KOTA	LUASAN KUMUH (HA)			SUMBER DATA
		Kewenangan Kab./Kota (< 10 Ha)	Kewenangan Provinsi (10 - 15 Ha)	Kewenangan Pusat (> 15 Ha)	
1	Barito Kuala	23,80	186,64	19,21	SK Kumuh Tahun 2017
2	Banjarmasin	153,42	73,55	322,73	SK Kumuh Tahun 2015
3	Banjarbaru	26,70	59,01	147,01	SK Kumuh Tahun 2018
4	Banjar	115,76	60,08	430,60	SK Kumuh Tahun 2013
5	Tapin	14,62	12,00	-	SK Kumuh Tahun 2016
6	Hulu Sungai Selatan	7,266	54,0	31,72	SK Kumuh Tahun 2014
7	Hulu Sungai Tengah	13,72	47,82	20,91	SK Kumuh Tahun 2018
8	Hulu Sungai Utara	27,33	55,53	40,59	SK Kumuh Tahun 2017
9	Balangan	8,71	27,11	-	SK Kumuh Tahun 2014
10	Tabalong	120,63	129,40	49,041	SK Kumuh Tahun 2018
11	Tanah Laut	64,73	141,20	-	SK Kumuh Tahun 2018
12	Tanah Bumbu	34,11	68,88	119,05	SK Kumuh Tahun 2014
13	Kotabaru	18,49	48,99	-	SK Kumuh Tahun 2018
JUMLAH TOTAL : 2.774,36		629,29	964,21	1.180,86	

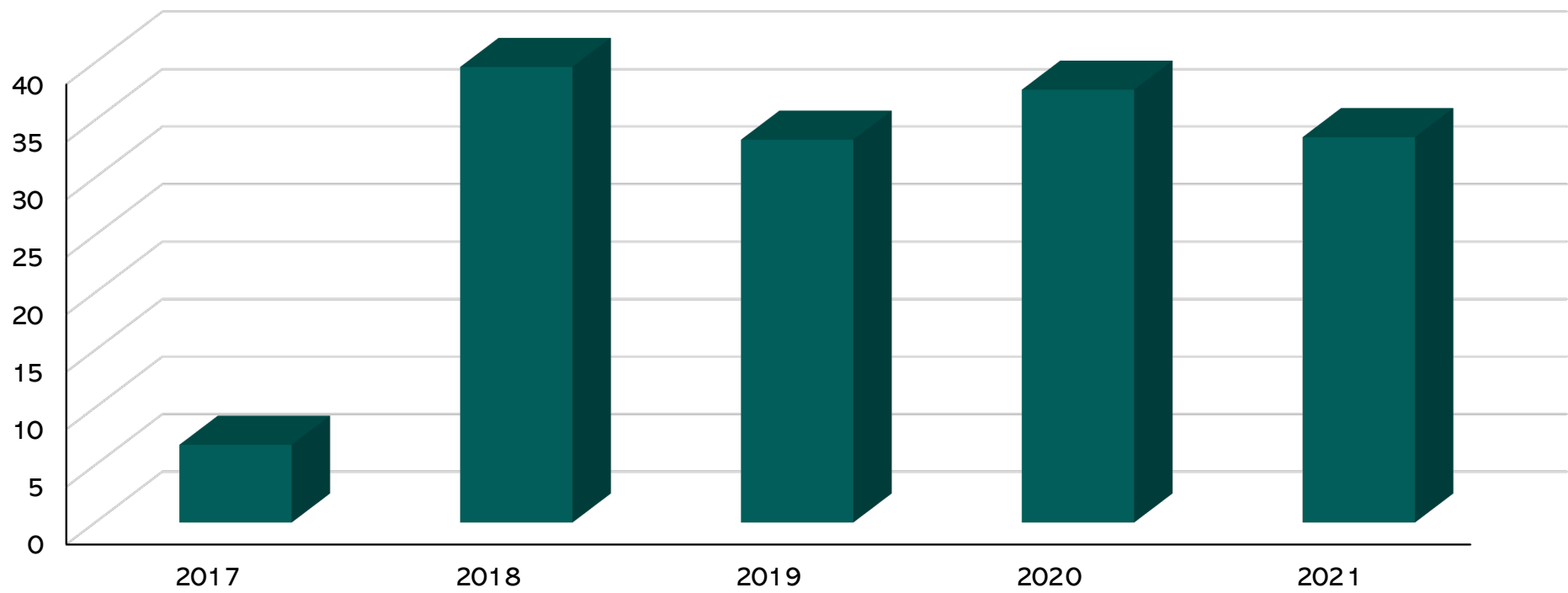
Sumber Data : SK Kumuh Kab./Kota dan Dinas PRKP Prov. Kalsel

KONDISI APBD TAHUN 2016 - 2021



REVIEW PEMBIAYAAN APBD
SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

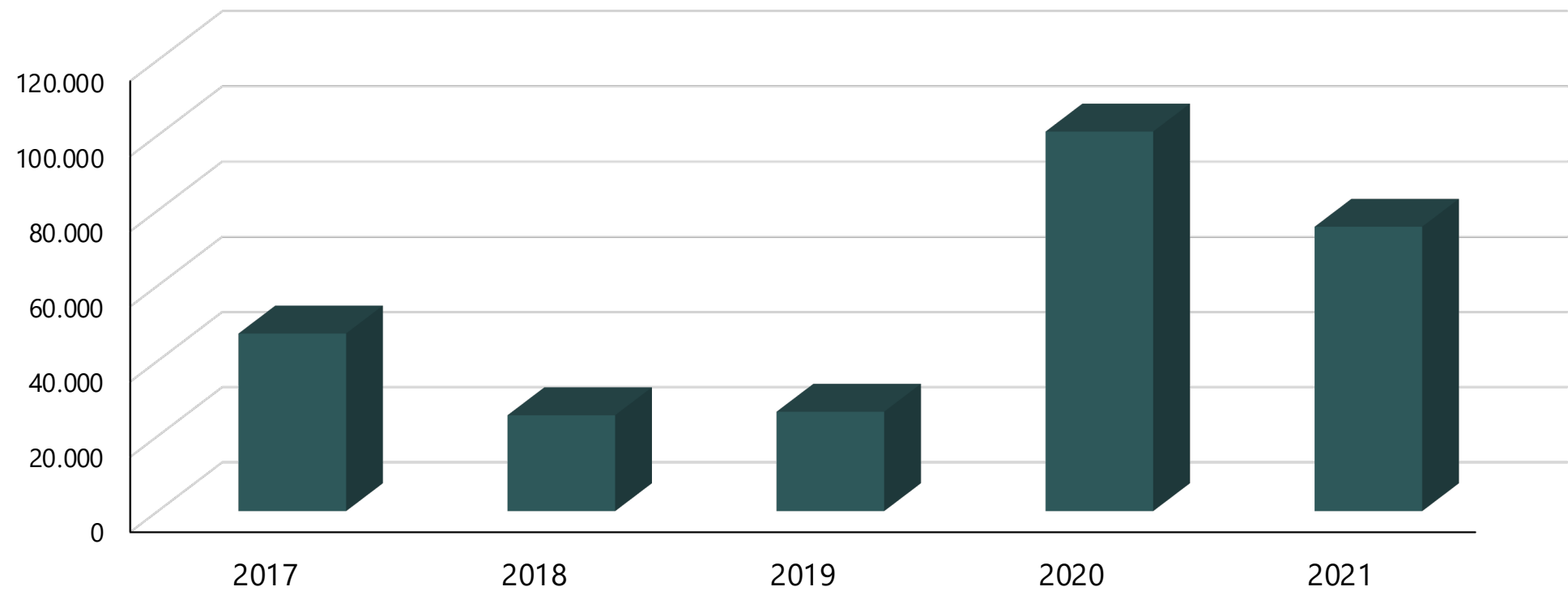
APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Kalsel
Tahun 2016 – 2020 (Rp Milyar)



Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
APBD-M Dinas Perkim (Rp)	6.756.675.000	39.614.100.000	33.289.850.000	37.635.680.750	33.512.623.000

KONDISI DAK BIDANG BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTA

DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (Rp Juta)



BIDANG DAK	DAK (Rp Juta)					
	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Perumahan dan Permukiman	47.252	25.509	26.448	100.971	75.645	275.825



3 ISU STRATEGIS



ISU STRATEGIS KALIMANTAN SELATAN

1

Belum optimal infrastruktur dasar dalam mendukung ekonomi (termasuk energi dan konektivitas)

2

Belum optimal kualitas SDM dan tenaga kerja berdaya saing (dalam mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur dan food estate di Kalimantan Tengah)

3

Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam (hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan)

4

Belum optimalnya perencanaan Kalimantan Selatan sebagai gerbang food estate dan IKN (jalur logistik dan konektivitas)

5

Belum optimalnya tata kelola pelayanan pemerintah daerah dan pelayanan ke masyarakat berbasis digital

6

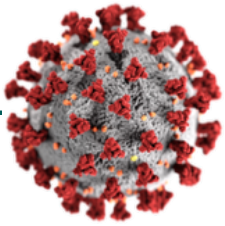
Belum terdiversifikasinya sektor ekonomi di Kalimantan Selatan dalam mendukung transformasi struktur ekonomi daerah (fokus kepada sektor pertanian, pariwisata, dan pelaku UMKM)

7

Masih seringnya terjadi banjir, kebakaran hutan dan lahan, dan keberadaan bekas lubang tambang, serta pencemaran air (sungai dan pesisir pantai)

BENCANA PANDEMI DAN BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN

Pandemi Covid - 19



a. PENGANGGURAN MENINGKAT



Pengangguran Meningkat dari 3,80 % pada Feb Tahun 2020 menjadi **4,74 %** Agustus Tahun 2020

b. KEMISKINAN MENINGKAT



Tingkat Kemiskinan pada 2019 = 4,38 % pada Mar Tahun 2020 dan diproyeksi pada Akhir Tahun 2020 = **5,20 %**

c. UMKM MENURUN

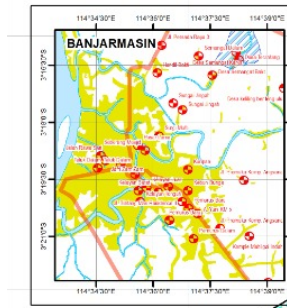


UMKM yang terdampak data sementara 7.395. Diproyeksi akan akan mencapai **10.000** sampai akhir tahun 2020

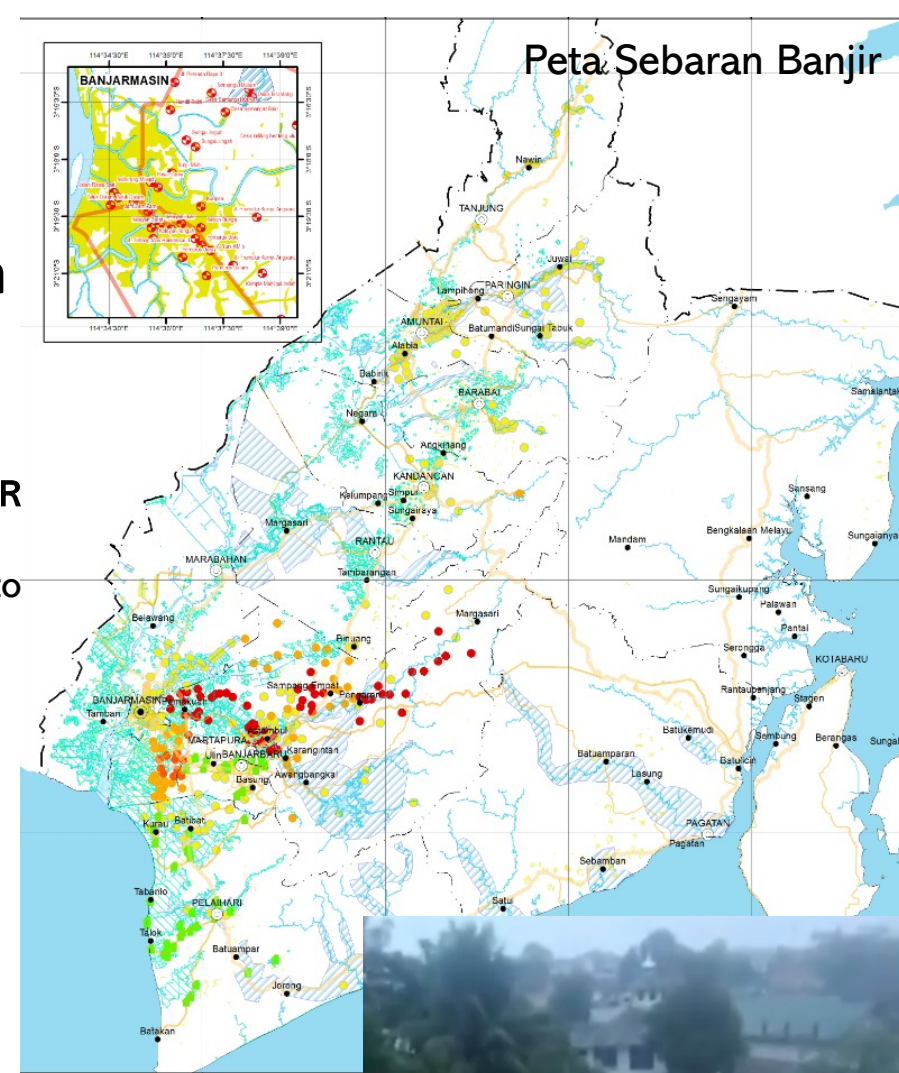
Banjir di Awal Tahun 2021

11 KAB/KOTA TERDAMPAK BANJIR

- 72 kecamatan pada DAS Barito
- 5 kecamatan pada DAS Maluka
- 5 kecamatan pada DAS Tabanio, dan
- 1 kecamatan pada DAS Kintap



Peta Sebaran Banjir



COVID-19 DI KALIMANTAN SELATAN

Data Per 21 Februari 2021

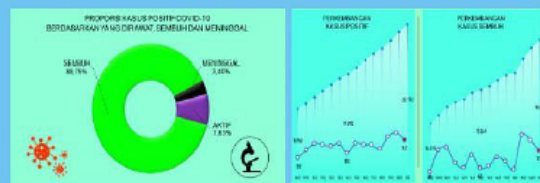
**SATUAN TUGAS PERCEPATAN,
PENGENDALIAN DAN PENANGANAN COVID-19
PROV. KALIMANTAN SELATAN**

SEBARAN KASUS POSITIF



SEMBUH, POSITIF DAN MENINGGAL HARI INI

SEMBUH 181		POSITIF 162		MENINGGAL 4	
Tanah Laut	11	Tanah Laut	21	Tanah Laut	2
Kotabaru	6	Kotabaru	14	(meninggal 20 & 21 Feb)	
Banjar	13	Banjar	3	Tanah Bumbu	1
Barito Kuala	8	Barito Kuala	8	(meninggal 21 Feb)	
Tapin	1	HS. Selatan	6	Balangan	1
HS. Selatan	7	HS. Tengah	1	(meninggal 18 Feb)	
HS. Utara	1	HS. Utara	5		
Tanah Bumbu	1	Tanah Bumbu	16		
Kota Banjarmasin	74	Kota Banjarmasin	41		
Kota Banjarbaru	59	Kota Banjarbaru	47		



SEMBUH 18.435

DALAM PERAWATAN	SUSPEK (DIDUGA COVID-19)	POSITIF COVID-19	MENINGGAL
1.631	547	20.773	707

NO.	KABUPATEN/KOTA	SUSPEK	KASUS COVID-19			
			POSITIF	SEMBUH	DIRAWAT	MENINGGAL
1	TANAH LAUT	37	2.136	1.910	166	60
2	KOTABARU	159	1.215	980	195	40
3	BANJAR	61	1.428	1.204	157	67
4	BARITO KUALA	12	1.323	1.149	159	15
5	TAPIN	2	688	646	15	27
6	HS. SELATAN	3	925	812	68	45
7	HS. TENGAH	11	783	706	11	66
8	HS. UTARA	11	726	671	24	31
9	TABALONG	-	552	542	-	10
10	TANAH BUMBU	5	1.786	1.629	114	43
11	BALANGAN	9	1.243	1.220	3	20
12	KOTA BANJARMASIN	232	5.136	4.602	348	186
13	KOTA BANJARBARU	5	2.832	2.364	371	97
JUMLAH		547	20.773	18.435	1.631	707

Attack Rate (AR) : 482.65 per 100.000 penduduk

Case Fatality Rate (CFR) : 3,4 %

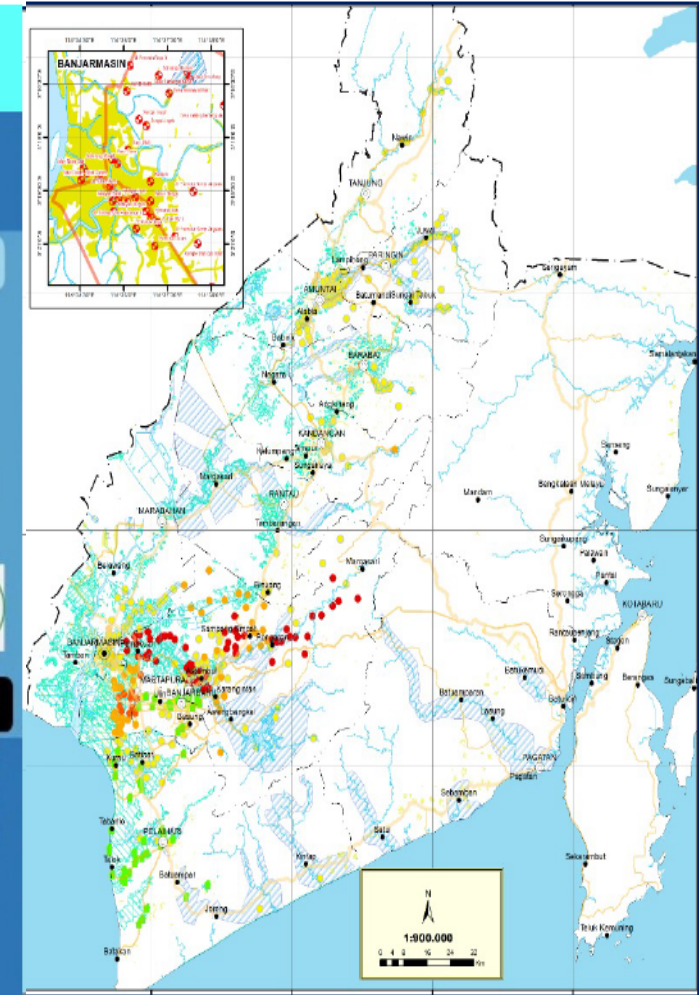
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan

PEMBAHARUAN
21 FEBRUARI 2021 PUKUL 16.00 WITA

BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN

Data Per 22 Februari 2021

Data Bencana Alam Banjir Provinsi Kalimantan Selatan





4 ARAH KEBIJAKAN



TUGAS PROVINSI/KAB/KOTA BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

PERUMAHAN

KABUPATEN/KOTA

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi



1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota

KAWASAN PERMUKIMAN

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas **10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha**



Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas **< 10 Ha**

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Penyelenggaraan PSU
Permukiman



Penyelenggaraan PSU
Perumahan

PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL



SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, Pasal 8



Layanan 1

Penyediaan dan rehabilitasi Rumah layak Huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota



Layanan 2

Penyediaan Rumah layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi/kabupaten/kota

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

KRITERIA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH (Permen PUPR Nomor 2/PRT/M/2016)

TINGKAT KEKUMUHAN
BERDASARKAN
FORMULASI PENILAIAN
LOKASI :

71 – 95 : Kumuh Berat
45 – 70 : Kumuh Sedang
19 – 44 : Kumuh Ringan

< 19 : Tidak Kumuh



Target dan Tujuan
Bersama

**DIHARAPKAN ADA
ANALISIS UNTUK
MASING-MASING
DARI 7 KRITERIA
KUMUH**

BANGUNAN
GEDUNG

- Ketidakteraturan bangunan
- Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang
- Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

JALAN
LINGKUNGAN

- Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman
- Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk

PENYEDIAAN
AIR MINUM

- Ketidaktersediaan akses aman air minum
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku

DRAINASE
LINGKUNGAN

- drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
- ketidaktersediaan drainase
- tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
- tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya
- kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

PENGELOLAAN
AIR LIMBAH

- sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

- Sarpras persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
- tidak terpeliharanya sarpras pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase

PROTEKSI
KEBAKARAN

- Prasarana proteksi kebakaran
- Sarana proteksi kebakaran

AMANAT DAN AGENDA GLOBAL



Implikasi SDGs Terhadap Arahan Pengembangan Infrastruktur PUPR :

- **Ketahanan Air Dan Kedaulatan Pangan:** Peningkatan Kapasitas Air Baku Baik Untuk Irigasi Maupun Air Bersih.
- **Pengelolaan Sumber Daya Air**
- Dukungan Infrastruktur PUPR: **Mempercepat Pengembangan Seluruh Kawasan Strategis.**
- **Akses Terhadap Air Minum Layak, Sanitasi Layak, Dan Hunian Layak.**
- **Perumahan Yang Layak, Aman, Terjangkau, Termasuk Penataan Kawasan Kumuh**
- Penyelenggaraan Infrastruktur Untuk **Mengurangi Disparitas Antarwilayah.**
- Adaptasi **RANMAPI**



IMPLEMENTING
THE NEW
URBAN AGENDA

The New Urban Agenda, diantaranya:

1. **Layanan dasar dan perumahan** yang aman dan terjangkau;
2. **Urbanisasi inklusif dan berkelanjutan;**
3. **Ketahanan terhadap bencana;**
4. Mengurangi **dampak lingkungan;**
5. **Memperkuat perencanaan** pembangunan nasional dan daerah;
6. Sistem **transportasi untuk semua;**
7. Meningkatkan **keselamatan jalan;**
8. **Melindungi warisan budaya** dan alam dunia;
9. **Mengurangi kerugian** akibat **bencana;**
10. **Ruang terbuka publik** dan hijau



RANMAPI

Menjawab tantangan penyelenggaraan infrastruktur PUPR **untuk kawasan rawan bencana** dan **antisipasi dampak perubahan iklim.**



PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari **perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan** nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

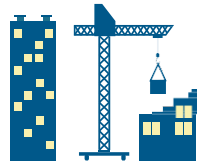
PILAR PEMBANGUNAN INDONESIA 2045



Manusia Indonesia unggul, berbudaya, dan menguasai iptek



Ekonomi maju dan berkelanjutan



Pembangunan merata dan inklusif



Negara demokratis, kuat, dan bersih



VISI, MISI, DAN ARAHAN PRESIDEN

VISI

“
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
”

MISI



Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

ARAHAN PRESIDEN

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang, Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL



PRIORITAS NASIONAL RKP TAHUN 2022

Tema RKP Tahun 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

PRIORITAS NASIONAL



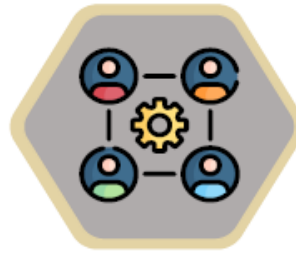
PN 1
Memperkuat
Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan
Berkualitas dan
Berkeadilan



PN 2
Mengembangkan
Wilayah untuk
Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin
Pemerataan



PN 3
Meningkatkan
Sumber
Daya Manusia
Berkualitas
dan Berdaya
Saing



PN 4
Revolusi
Mental
dan
Pembangunan
Kebudayaan



PN 5
Memperkuat
Infrastruktur
untuk Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar

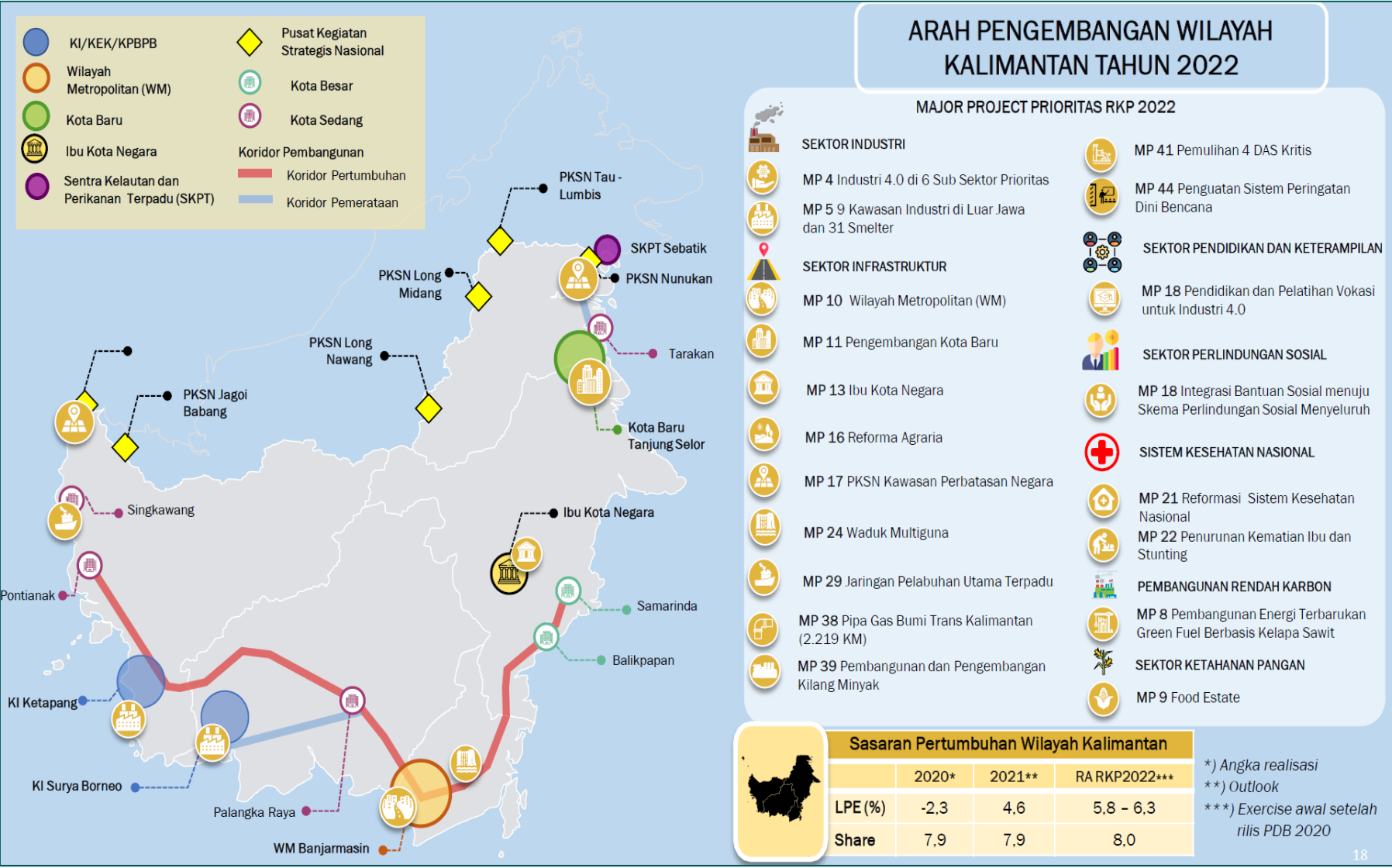


PN 6
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan
Bencana, dan
Perubahan Iklim



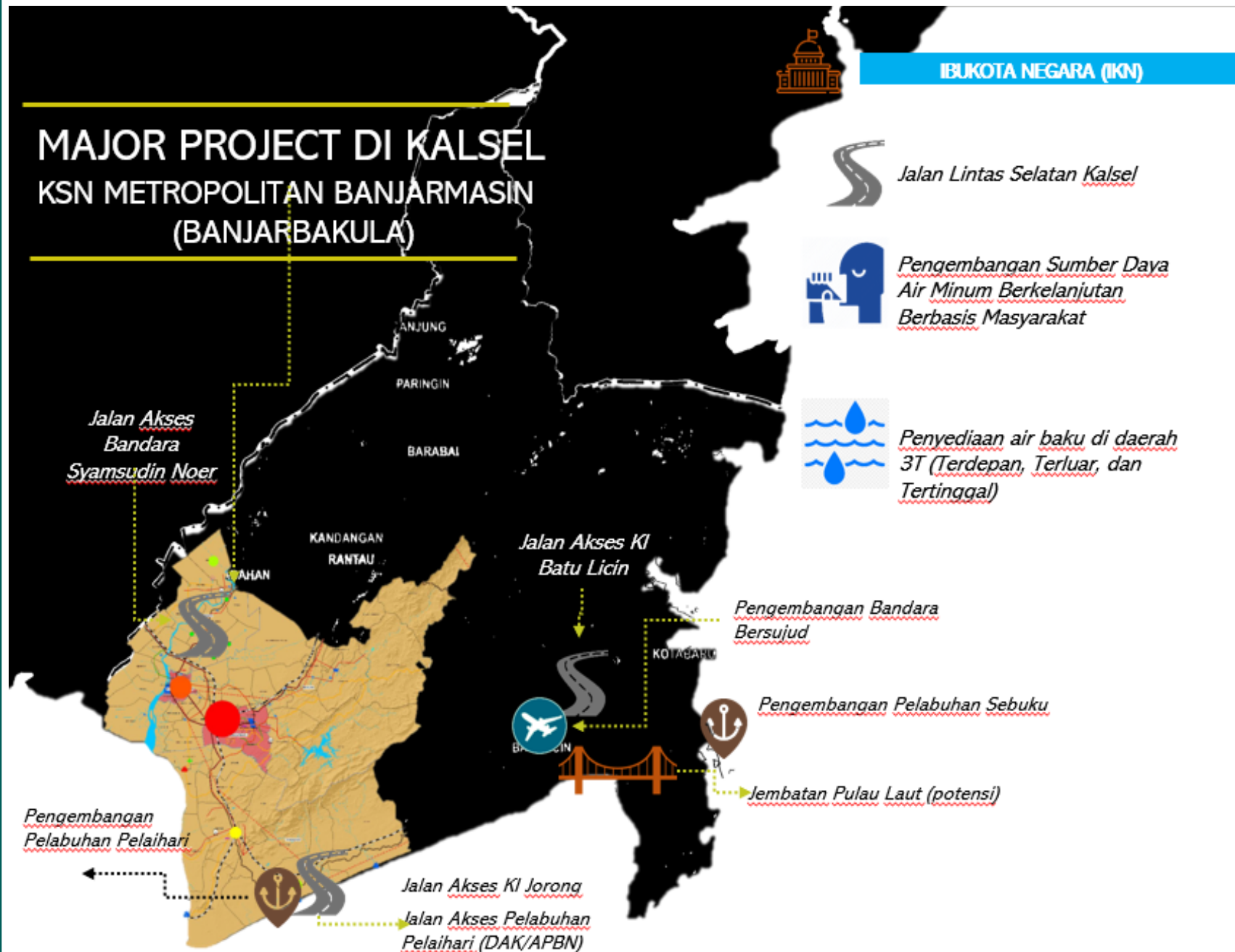
PN 7
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam
dan Transformasi
Pelayanan
Publik

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2022



PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMN 2020 – 2024 DI KALSEL

MAJOR PROJECT DI KALSEL KSN METROPOLITAN BANJARMASIN (BANJARBAKULA)



Penyediaan air baku di kawasan perkotaan



Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan terkait modernisasi irigasi




Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir



Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota

Sasaran Pertumbuhan per Wilayah dan Daerah 2022



Kalimantan


	2020*	2021**	RA RKP2022***
LPE (%)	-2,3	4,6	5,8 – 6,3
Share	7,9	7,9	8,0

- Tahap konstruksi IKN, dan KI Batulicin, Jorong, Batanjung, tanah kuning
- Operasional KI Ketapang dan Surya Borneo

Sasaran Rancangan Awal per Provinsi 2022

Rancangan awal RKP 2022

Indonesia: 5,4 – 6,0 persen



Kalimantan Selatan

	Realisasi	Outlook	RA RKP
	2020	2021	RA RKP2022
LPE (%)	-1,8	3,8	5,0 – 5,5
Share	1,1	1,1	1,1

Faktor Pendorong

- Pemulihan ekonomi global diperkirakan akan mendorong peningkatan produksi batu bara dan CPO
- Permintaan CPO diperkirakan meningkat seiring dengan outlook harga yang positif

*) Angka realisasi
**) Outlook
***) Exercise awal setelah rilis PDB 2020
Proyeksi diperkirakan akan kembali pada arahan dalam RPJMN yang mengamanatkan rata-rata pertumbuhan KTI yang lebih tinggi dibandingkan dengan KBI dan bergesernya share ke KTI

Pola Pertumbuhan Ekonomi 2011 – 2019 dan PDRB per Kapita



KALIMANTAN SELATAN
Regional 2

- Pertumbuhan ekonomi **di bawah rata-rata** nasional (5,1%)
- Rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita **rendah** (3,2%)
- Nilai PDRB Perkapita **rendah** (Rp. 31,4 Juta)

Analisis Pertumbuhan dari Sisi Produksi



KALIMANTAN SELATAN
Regional 2

Isu: Tren *green recovery* dan kebijakan pembatasan CPO di Uni Eropa

- Sektor Utama: Pertambangan (18,7%), Pertanian (14,4%) Industri (13,6%)
- Komoditas ekspor: Kelompok bahan Bakar mineral dan Lemak dan minyak hewan/nabati

Analisis Pertumbuhan dari Sisi Pengeluaran



KALIMANTAN SELATAN
Regional 2

Isu: Ekspor didominasi oleh kelompok bahan Bakar mineral, Lemak dan minyak hewan/nabati, serta besi dan baja

- Komponen Utama: Ekspor (62,7%), dan Konsumsi Rumah Tangga (48,2%)

Keterangan:

- Pertumbuhan ekonomi tahun 2011-2019 sebelum rilis PDB 2020
- Pertumbuhan PDRB per kapita 2011 – 2019 sebelum rilis PDB 2020
- Nilai PDRB per kapita 2019 sebelum rilis PDB 2020

TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI

Tergantung Komoditas Bahan Mentah / Setengah Jadi



Batu bara



Karet



Sawit



Kayu

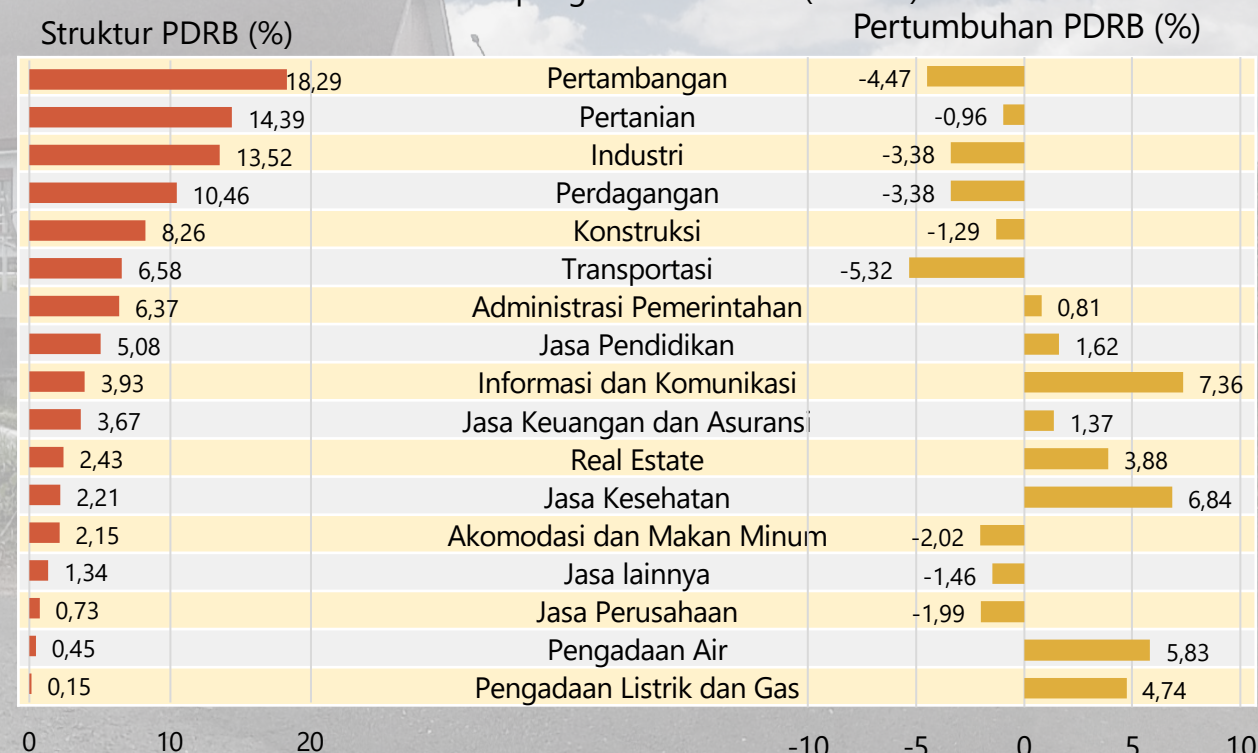
Dominasi Sektor Tambang

Tahun 2018
20,61%

Tahun 2019
18,69%

Tahun 2020
18,29%

Struktur PDRB (%) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha 2020 (Y-on-Y)



SHIFTING (PERGESERAN) KE SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN YANG BERKELANJUTAN

PERTANIAN

- Lembaga pengelola
- Peningkatan kualitas SDM
- Progress Kawasan
- Perkuatan teknologi
- Regulasi dan Perijinan
- Konektivitas kawasan



PARIWISATA

- Berbasis alam (geopark)
- Lembaga Pariwisata (Kemasyarakatan)
- Keamanan dan kenyamanan

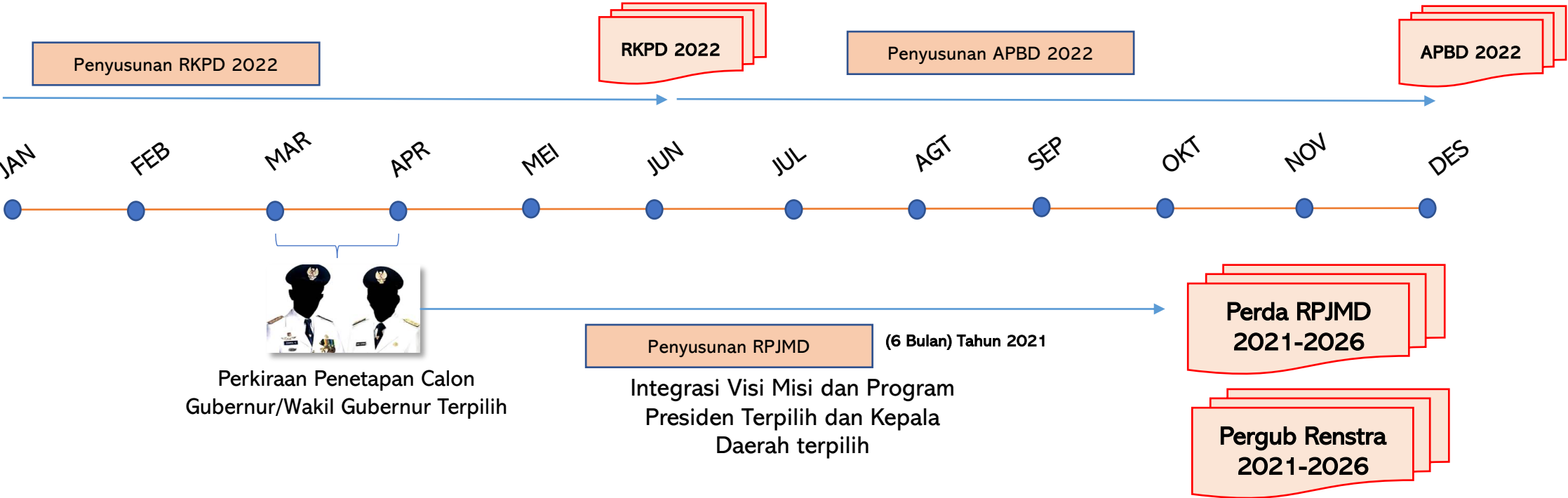


REVITALISASI DAN HILIRISASI INDUSTRI

- Modernisasi Sarana Prasarana
- Modernisasi Pengusahaan (Petani & Pengusaha Agribisnis)
- Modernisasi Perusahaan (Usaha)
- Modern Struktur agribisnis (jaringan)



PENYUSUNAN RPJMD 2021-2026 DAN RKPD 2022



Pasal 201 ayat (7)

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.

PILKADA SERENTAK 2020

270 Daerah

PELANTIKAN

Februari – Juni 2021

PERIODESASI

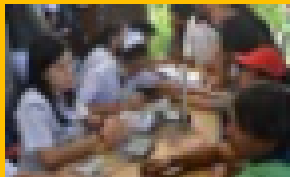
2021-2026

RANWAL RKPD 2022

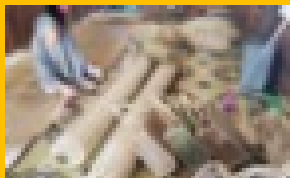
TEMA 2022

"MEMANTAPKAN PEMULIHAN
EKONOMI DAN SOSIAL
DENGAN MEMPERHATIKAN
LINGKUNGAN"

FOKUS PEMBANGUNAN



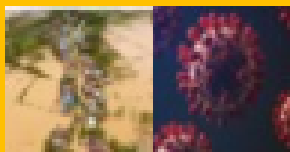
Kesehatan, pendidikan,
dan keterampilan



UMKM



Investasi Hilirisasi Industri,
Pertanian, dan Pariwisata



Banjir dan Covid-19

PRIORITAS DAERAH (PD)



RANWAL RKPD 2022

PD 1 : HILIRISASI INDUSTRI, PENINGKATAN SEKTOR PERTANIAN DAN PARIWISATA

SUB PRIORITAS

1. Peningkatan Nilai Tambah hasil Industri dan Pertanian
2. Mendorong Pariwisata dan Pengembangan Geopark
3. Peningkatkan Jumlah dan Kelas Wirausaha baru
4. Peningkatan Realisasi Investasi yang berdampak ke Daerah

PD 2 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

SUB PRIORITAS

1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
3. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
4. Pengendalian Prevalensi Stunting
5. Penurunan Angka Pernikahan Anak
6. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
7. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan
8. Peningkatan Prestasi Olahraga

PD 3 : MEMPERKUAT SARANA PRASARANA DASAR DAN PEREKONOMIAN

SUB PRIORITAS

1. Pengembangan Kawasan Prioritas
2. Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi
- 3. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar**

PD 4 : TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

SUB PRIORITAS

1. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender
2. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Peningkatan Pelayanan Publik
4. Pengembangan Satu Data Kalsel

PD 5 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN MEMPERKUAT MITIGASI KETAHANAN BENCANA

SUB PRIORITAS

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana
3. Mendorong Penggunaan Energi Baru Terbarukan

PD 6 : PENGEMBANGAN KALSEL SEBAGAI GERBANG FOOD ESTATE DAN IBUKOTA NEGARA

SUB PRIORITAS

1. Membuka Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN
2. Mengembangkan Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN
3. Pembangunan SDM Pendukung IKN dan Food Estate



KEBIJAKAN DI URUSAN PERKIM

PD 3 : MEMPERKUAT SARANA PRASARANA DASAR DAN PEREKONOMIAN

SUB PRIORITAS 3 : PEMENUHAN PENCAPAIAN INFRASTRUKTUR DASAR

01

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Kegiatan Prioritas

1. Pembangunan PSU permukiman (jalan lingkungan) di Kab. Banjar, HSU, dan Barito Kuala
2. Perencanaan PSU di 13 kabupaten/kota

02

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kegiatan Prioritas

1. Identifikasi, sosialisasi, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi

Lokus : Kab. HST, Banjar, Tanah Laut

03

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan Prioritas

1. Penataan kawasan dan peningkatan kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Lokus : 13 kabupaten/kota pada kewenangan kumuh provinsi

PD 5 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN MEMPERKUAT MITIGASI KETAHANAN BENCANA

SUB PRIORITAS 2 : PELAKSANAAN MITIGASI DAN PEMULIHAN PASCA BENCANA

01

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kegiatan Prioritas

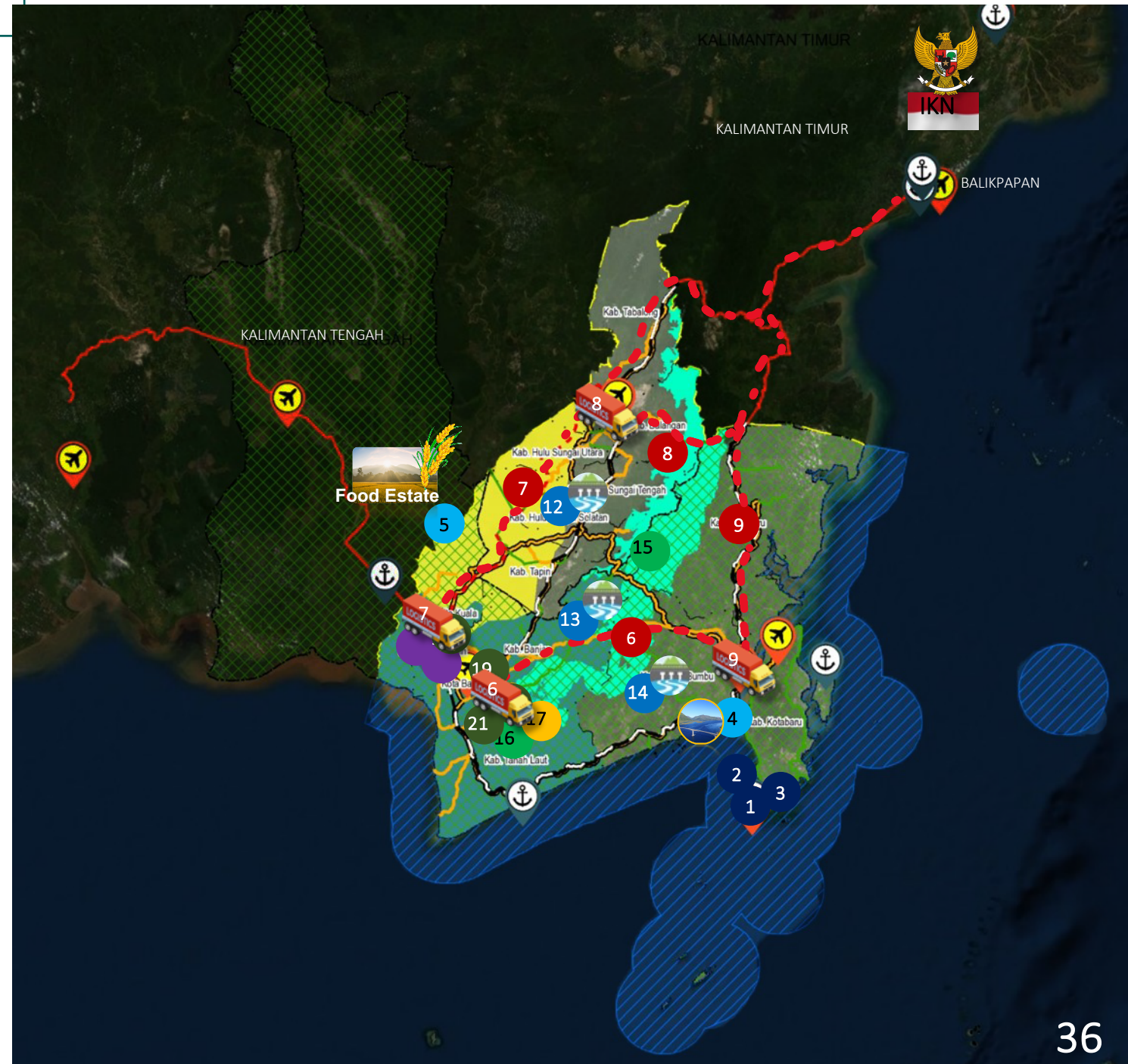
1. Identifikasi, sosialisasi, persiapan, pembangunan, dan rehabilitasi rumah korban bencana

Lokus : Prov. Kalsel

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

- 1 KEK Mekar Putih
- 2 Pelabuhan Internasional Utama Mekar Putih
- 3 Sentra Kelautan Perikanan Terpadu dan Marine Industry
- 4 Jembatan Penghubung : Pulau Laut – Pulau Kalimantan
- 5 Jembatan Dadahub (Kalsel – Kalteng)
- 6 Jalan Bebas Hambatan : Banjarbaru – Batulicin
- 7 Jalan Lintas Barat : Kab. Barito Kuala – Kab. Tapin – Kab. HSU – Kab. Tabalong.
- 8 Jalan Halong - Manggalau
- 9 Jalan Tol Batulicin - IKN
- 10 Pusat Jantung dan Kanker Terpadu di RSUD Ulin
- 11 Pusat Infeksi dan Saraf Terpadu di RSUD Ansari Saleh

- 12 Bendungan Hanau  Pancur
- 13 Bendungan Riam Kiwa 
- 14 Bendungan Kusan 
- 15 Pengembangan Geopark Pegunungan Meratus
- 16 Kiram park
- 17 Pusat Pelatihan dan Pendidikan Karhutla
- 18 Pasar Induk dan Pusat Distribusi Regional
- 19 Aero City Syamsudin Noor
- 20 Sport City
- 21 Digital Valley of Borneo dan Pusat Data Nasional



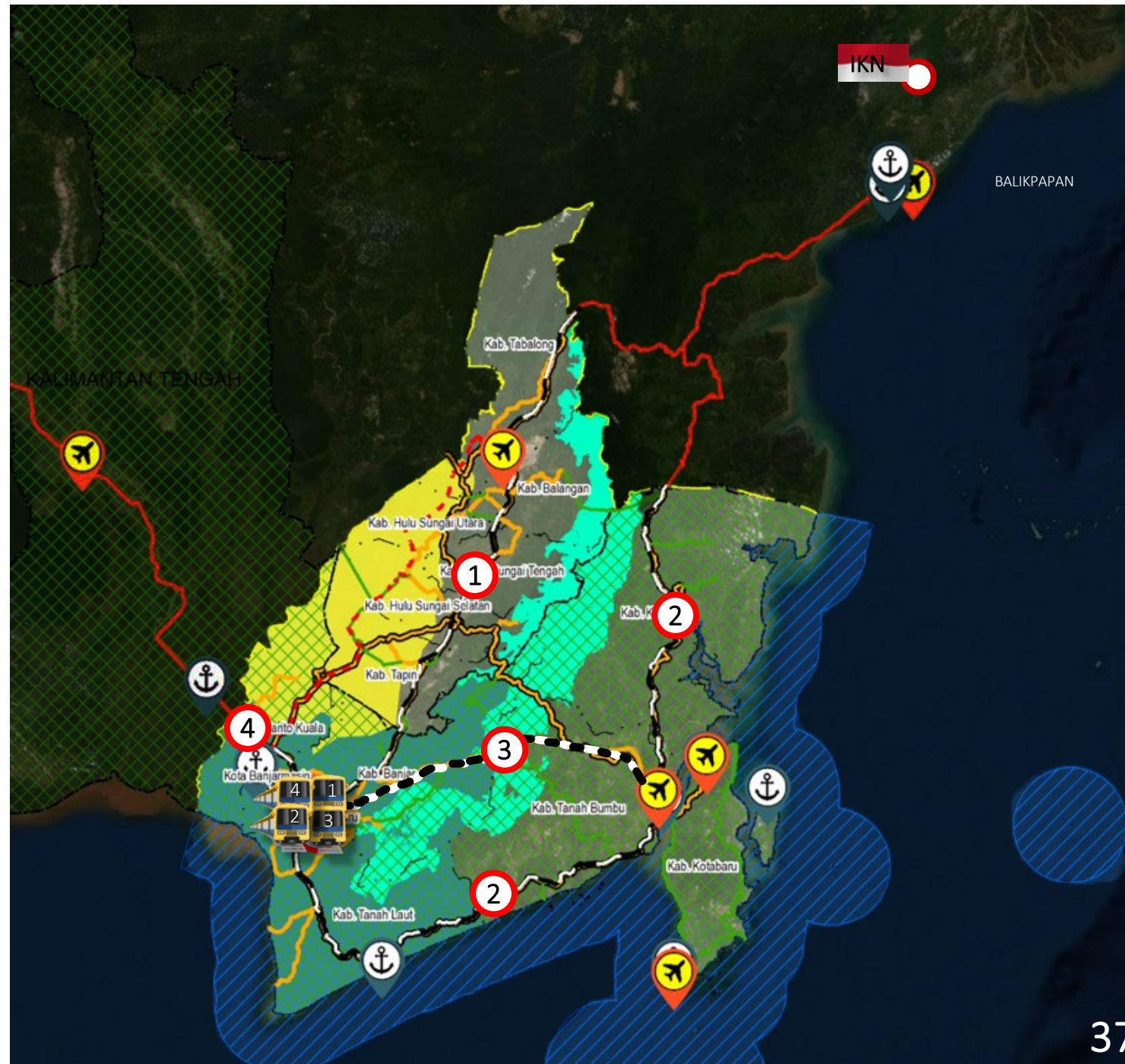
RENCANA KERETA API



- 1 Banjarmasin – Martapura – Rantau – Barabai – Tanjung – Batas Kalimantan Timur (Kearah IKN)
- 2 Banjarmasin – Pelaihari – Asam-asam – Satui – Pagatan – Batulicin – Kotabaru – Batas Kalimantan Timur (Kearah IKN)
- 3 Banjarmasin – Batulicin
- 4 Banjarmasin – Kalimantan Tengah
- 5 Kereta Bandara

Rencana Pembangunan dan Pengoperasian dengan Skema KPBU
(Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha)

Rencana Rel Kereta Api
(Garis Warna Hitam dan Putih)



RENCANA PENGEMBANGAN SDM

a. Industri

1. Jurusan Teknik / Managemen Industri

- Lokasi :ULM
- Instansi Terkait: Kementerian Perindustrian



2. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

- Lokasi : Kawasan Industri Batulicin
- Instansi Terkait:Kementerian Perhubungan



3. Jurusan KeBandaraan

- Lokasi : Poltek Banjarmasin
- Instansi Terkait : Kementerian Perhubungan



4. Jurusan KePelabuhanan

- Lokasi : Poltek Banjarmasin
- Instansi Terkait : Kementerian Perhubungan



5. Jurusan Teknik Perkapalan

- a. Lokasi : ULM
- b. Instansi Terkait : Kementerian Perhubungan



6. Jurusan Geologi

- Lokasi : ULM
- Instansi Terkait : Kemen ESDM



b. Pertanian dan Pangan

7. Politeknik Kerawaan dan Sungai

- Lokasi : Jalan Lingkar Utara
- Instansi Terkait : Kementerian PUPR



8. Politeknik Peternakan

- Lokasi : Politeknik Tanah Laut
- Instansi Terkait : Kemenristek dan Kementerian Pertanian



9. Politeknik Pertanian

- Lokasi : Banjarbaru
- Instansi Terkait : Kemenristek dan Kementerian Pertanian



c. Pariwisata

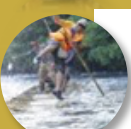
10. Jurusan Seni dan Budaya

- Lokasi : ULM
- Instansi Terkait : Kemenristek, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan



11. Jurusan Pariwisata / Ilmu Pariwisata

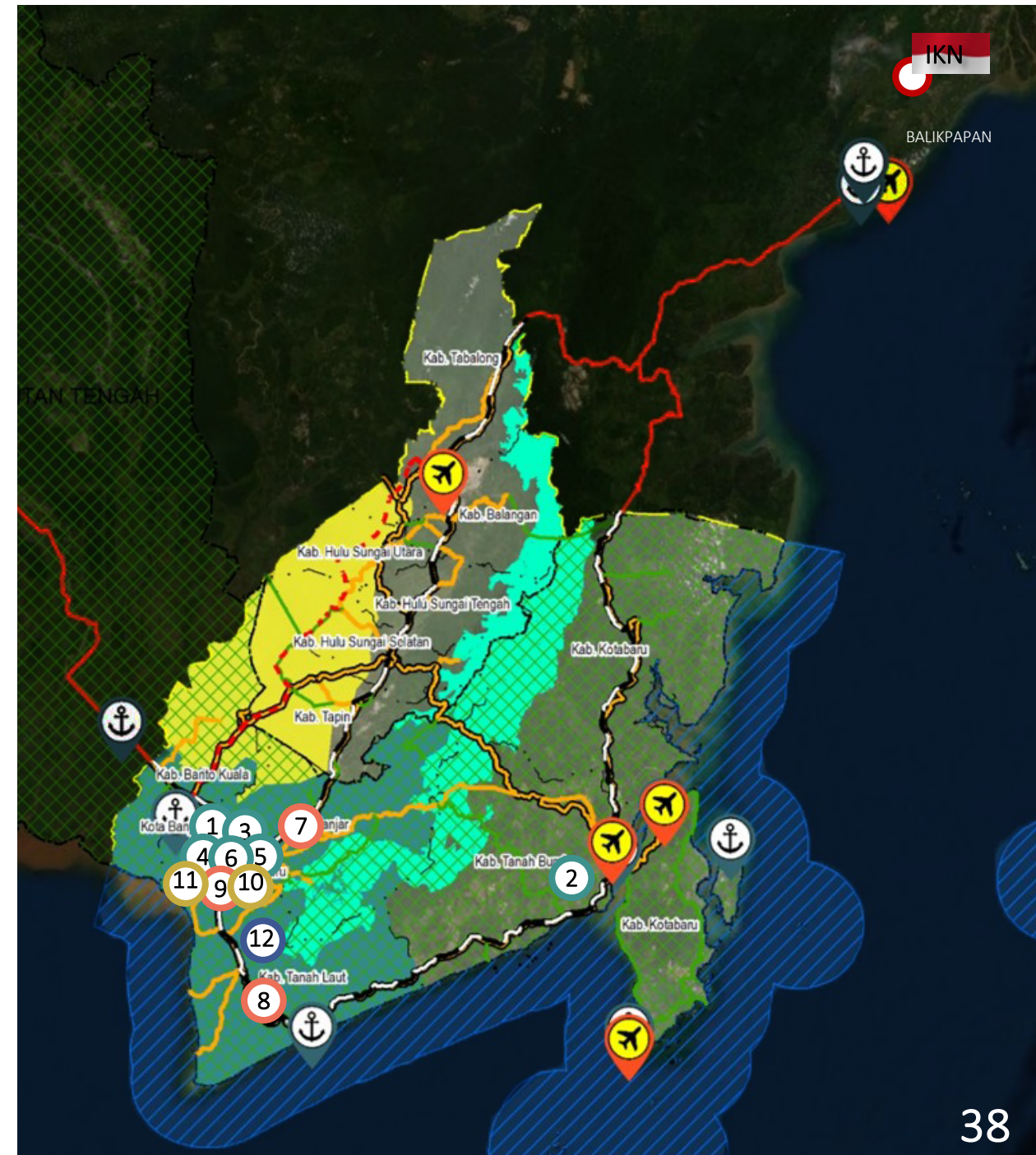
- Lokasi : Politeknik Banjarmasin
- Instansi Terkait : Kemenristek, dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif



d. Digital

12. Digital Valley of Borneo

- a. Lokasi : Kiram
- b. Instansi Terkait : Kemenristek





REKAPITULASI TABEL USULAN PROYEK PRIORITAS KALSEL



MAJOR PROJECT/ PROYEK PRIORITAS NASIONAL/ USULAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN		LOKASI (KAB/KOTA)	INDIKASI INSTANSI PELAKSANA	INDIKASI SUMBER PENDANAAN	DUKUNGAN DAERAH (APBD)	KESIAPAN PROYEK (LAHAN/FS/DED DAN LAINNYA)
A. (MP 36) PEMULIHAN EMPAT DAERAH ALIRAN SUNGAI KRITIS						
1	Normalisasi Sungai Martapura	Kab. Banjar dan Kota Banjarmasin	Kemen PUPR	APBN	DED	Lahan tersedia
2	Rehab DAS Barito	Kab. Tabalong, Kab. Balangan, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Selatan, dan Kab. Tapin Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, dan Kota Banjarmasin,	KLHK	APBN	-	Lahan kritis yang ada di DAS Barito
3	Pembangunan Embung Jaro	Kab. Tabalong	Kemen PUPR	APBN	DED	Lahan dalam proses pembebasan
B. (MP 9) PENGEMBANGAN WILAYAH METROPOLITAN: PALEMBANG, BANJARMASIN, MAKASSAR, DENPASAR						
4	Pembangunan Jalan Lintas Metropolitan Banjarmasin - KI Batulicin	Banjarbaru - Batulicin (Kab. Tanah Bumbu)	Kementerian PUPR	APBN	RTRW, FS (2016), AMDAL, DED (2017-2018), Review Desain (2019)	Ketersediaan lahan, Jembatan, dan Perkerasan badan jalan
5	Pembangunan Pusat Jantung Terpadu di RSUD Ulin	Banjarmasin	Kementerian Kesehatan	APBN	DED	Ketersediaan lahan dan DED
6	Penataan Kawasan Permukiman (Air Minum, Sanitasi, RTLH, dan Kawasan Permukiman Kumuh)	Metropolitan Banjarmasin	Kementerian PUPR	APBN	DED	Ketersediaan lahan, DED
C. MP 4 - PENGUATAN JAMINAN USAHA SERTA 350 KORPORASI PETANI DAN NELAYAN						
7	Kawasan Karet	Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Tabalong, Kab. Balangan, Kab. Tanah Laut, dan Kab. Tanah Bumbu	Kementerian Pertanian	APBN	Master Plan Korporasi Karet	Ketersediaan lahan, Master Plan
8	Sarana Prasarana Korporasi Petani Padi	Kab. Barito Kuala	Kementerian Pertanian, PUPR	APBN	Master Plan Korporasi Petani Kab. Barito Kuala	Ketersediaan lahan, Master Plan
9	Pembangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) di KSN Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Kementerian Perdagangan	APBN	Master Plan (2021)	Ketersediaan lahan, Master Plan

KESIMPULAN

1. Kegiatan yang diusulkan diarahkan pada kegiatan yang sangat Prioritas
2. Selain APBD diharapkan seluruh SKPD memperjuangkan APBN dapat turun ke Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mencari alternatif pendanaan lain baik melalui BUMN ataupun pembiayaan swasta

3. SELAMAT MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan



Jl. Dharma Praja I,
Kawasan Perkantoran Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan
Kota Banjarbaru, Kode Pos (70700)



+62 511 6748643



+62 511 6749644



www.bappeda.kalselprov.go.id



ilh.bappedakalsel@gmail.com
ilh.bappedakalsel@qmail.id



facebook.com/bappedaprovkalsel



[@bappeda_kalsel](https://www.instagram.com/bappeda_kalsel)